

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSJD SURAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JULI MUHAMAD KARTIKO
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KEPERAWATAN RAWAT INAP & RUJUKAN
3. NHK : 832391

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 300.000.000

1. Tanah Seluas 106 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 27.500.000

1. MOTOR, HONDA FIT X Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
5. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 8.500.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 336.000.000**III. HUTANG** Rp. 39.560.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 296.440.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.